

## RESENSI BUKU

Judul : **Djawa Dipa: Sama Rata, Sama Rasa, Sama Bahasa 1917-1922**  
Penulis : Muhammad “Mone” Husni Thamrin  
ISBN : 9786237357292  
Penerbit : Komunitas Bambu  
Tebal : 134 hal.

Imelda

*Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional*  
imel001@brin.go.id

Djawa Dipa (DD) merupakan sebuah gerakan yang berasal dari akumulasi berbagai perubahan politik, ekonomi, komunikasi, dan budaya yang berimbas pada bangkitnya kesadaran kelompok buruh marginal yang selama ini ditekan oleh kepentingan modal pada periode politik etis. Melalui motonya, *sama rata-sama rasa-sama bahasa*, DD mengusung perjuangan rakyat kecil tertindas untuk meraih keadilan sosialnya. Khusus menyoroti isu kebahasaan, Thamrin (2022) merangkai masa lalu lewat surat kabar Hindia Dipa yang terbit selama dua tahun (1921-1922) dan berbagai sumber yang mengisahkan peristiwa munculnya gerakan ini. Gerakan ini menekankan bagaimana bahasa Jawa Ngoko menjadi **bahasa perlawanan kaum buruh** tertindas akibat ketidakadilan yang terjadi dengan masuknya modal kapitalisme di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Setidaknya ada tiga pokok bahasan yang didiskusikan dalam buku ini. Pertama, diskusi tentang berbagai aspek pendorong hadirnya DD di masyarakat, terutama politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Bahasan kedua ialah tentang gerakan DD itu sendiri, yaitu berbagai argumentasi yang dikemukakan dalam pembentukan organisasi.. Terakhir, buku ini mendiskusikan kemunduran DD, terutama karena kegagalan transformasi budaya di tengah tokoh pergerakan orang Jawa yang masih kuat memegang tradisi kebahasaannya.

### ***Pada Mulanya Transformasi Sosial***

Ben Anderson mengemukakan sebuah konsep penting dalam nasionalisme masyarakat Indonesia yang disebut dengan *Imagined Community* (1983). Istilah tersebut, secara ringkas bermakna bahwa nasionalisme (Indonesia) merupakan hasil dari perasaan senasib yang dibentuk secara sosial, baik itu oleh informasi material maupun non-material, terutama kapitalisme cetak yang dilubrikasi oleh kecepatan distribusi barang dan jasa karena jalur transportasi yang semakin cepat dan memiliki jangkauan luas. Barangkali konsep nasionalisme yang dikemukakan Anderson cukup jauh dari periode Djawa Dipa (1917-1922) akan tetap gejala yang muncul serupa. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan periode awal nasionalisme Jawa.

Kebijakan pemerintah kolonial menerapkan Sistem Ekonomi Liberal merupakan titik baru perubahan di tanah jajahan. Setelah sistem Tanam Paksa gagal, para investor diundang untuk berinvestasi, terutama di perkebunan dan manufaktur. Untuk menopang industri tersebut, berbagai fasilitas disediakan, antara lain: sistem sewa lahan, kredit bank, tenaga buruh, dan infrastruktur (jalan, kereta api, pelabuhan) (Thamrin, 2022: 3). Masuknya modal ini kemudian mengubah struktur di dalam pemerintahan kolonial. Semula para priyayi Jawa menjadi kaki

tangan Belanda, kemudian mereka dilegalkan statusnya menjadi pegawai Belanda dan diberikan gaji. Sebagai konsekuensi, pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah untuk memenuhi permintaan pasar guna mendidik juru tulis, juru bayar, dan pegawai rendahan. Tingginya permintaan tenaga kerja juga, kemudian, meluaskan peluang kepada pribumi non-priyayi untuk menempuh pendidikan. Selain itu, di tahun 1870, ketika penerapan Undang-Undang Agraria berlaku permintaan tenaga buruh semakin meningkat karena tanah-tanah terlantar yang diklaim negara banyak digunakan untuk industri. Saat itu para penguasa lokal di tanah Jawa yang mengalami surplus penduduk (baca: tenaga kerja) memobilisasi para petani ke tempat-tempat baru.

Salah satu aspek penting yang mendorong DD ialah perkembangan di bidang pendidikan. Ketika pada masa Sistem Ekonomi Liberal, kesempatan pribumi untuk belajar sudah luas, di masa Politik Etis kesempatan ini dibuka lebih luas lagi. Selain itu, di tahun 1890 pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan agar para priyayi lokal mahir dalam dua atau tiga bahasa (Jawa, Melayu Pasar, dan Belanda). Menariknya, buah dari pendidikan ini selain bekerja sebagai buruh ada pula yang bekerja di bidang jurnalistik. Lewat koran-koran yang dihantarkan melalui jalur kereta api, kesadaran di tengah masyarakat dibangkitkan. Lewat media ini pula, kosakata baru, seperti *partij*, *parlemen*, *kongres perkoempoelan boet beremboek*, *vergadering (perkoempoelan)*, dan lain sebagainya, disebarluaskan kepada masyarakat. Koran menjadi kamus politik bagi masyarakat. Berbagai kosakata tersebut akhirnya diserap ke dalam bahasa Melayu dan lokal yang kemudian membuka kesadaran kaum buruh. Di tahun 1917-1918 radikalisasi gerakan buruh pabrik gula, penggadaian, dan lain sebagainya meningkat (Thamrin, 2022:12).

Perubahan politik dan ekonomi mempengaruhi bahasa di kalangan pergerakan. Hilangnya wibawa kaum priyayi yang berbahasa Jawa *Kromo*, meluasnya kemampuan multilingual di orang Jawa, kapitalisme cetak, dan kesadaran tentang ketertindasan telah menopang orang Jawa kepada tradisi kebahasaan yang baru. Anderson, disinggung oleh Thamrin (2022), lebih jauh memaparkan bahwa melemahnya peran kelas atas masyarakat Jawa terjadi ketika para priyayi Jawa merasa bahwa bahasa *Kromo* tidak lagi mampu menyampaikan ekspresi. Kita telah mengetahui bahwa Jawa *Kromo* dan *Ngoko* ini juga mengandung kelas sosial, ketika ekonomi pasar merebut ruang sosial ini, maka perilaku berbahasa juga ikut bersama arus pasar. Meluasnya penggunaan bahasa Melayu dan Belanda, tumbuhnya kesadaran tentang feodalisme keraton yang tersublimasi dalam Jawa *Kromo*, dan kehendak “merdeka” dari kungkungan budaya lama, serta perjuangan dari ketertindasan di kalangan buruh telah mendorong kaum pergerakan menggunakan Jawa *Ngoko*.

### **Djawa Dipa Berjaya**

*Zaman perobahan ini, atoeran bahasa Fjawa ‘Kromo’ itoe hanjalah membikin soesah dan sengsara kita Djawa sadja. Berlantaran atoeran bahasa Djawa ‘Kromo’ itoe tidak sedikit bilangannya, kita bukan bangsa ‘Sastrawan’ sama terdjeroemoes ke dalam pendjara, oleh karena mereka itoe tidak bisa menggambarkan dengan perkataan atau bahasa betapa jang terasa di dalam hati perasaannja. Maka ketjelakaan dan kesengsaraan perndjara itoe, bagi kita boekan bangsa ‘Sastrawan’ hanjalah lantaran soesahnya atoeran bahasa Djawa ‘kromo’, ada di moeka persidangan hakim.”*  
(Pidato Tjokrosoedarmo, dalam Thamrin, 2022:24)

Kutipan di atas merupakan pernyataan Tjokrosoedarmo, pencetus Djawa Dipa, ketika ia menyampaikan tujuan pertemuan pertama di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1917. Pada pertemuan dua hari yang dihadiri oleh 1.267 orang (Thamrin, 2022:23) ia menyampaikan tujuan pendirian Comite Djawa Dipa, yaitu ... *mewujudkan kebahagiaan dan kemuliaan bangsa Jawa* dengan bahasa Jawa (Thamrin, 2022:24). Kemuliaan dalam konteks bahasa yang dimaksud ialah meminimalkan penggunaan bahasa Jawa yang dinilai rumit dan menyarankan untuk menggantinya dengan bahasa Jawa Asli yang disebut Jawa *Ngoko*. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan menghapuskan sembah jongkok dan bentuk penghormatan lainnya. Gelar bangsawan dan priyayi (*pangeran, raden mas, raden ayu*) juga diganti dengan panggilan yang berasal dari Jawa kuno (*woro dan loro*).

Apa yang diperjuangkan oleh DD ini bukanlah tanpa tantangan. Di kalangan orang Jawa sendiri, Tjipto Mangoenkoesoemo misalnya, menolak gerakan ini karena ia menginginkan persatuan untuk seluruh Hindia Belanda. Baginya, DD melakukan serangan dengan kaum priyayi dan bangsawan yang notabene orang Jawa. Sementara itu, Tjokroaminoto yang juga sebelumnya tidak sepakat dengan DD, kemudian menyadari pentingnya gerakan ini. Ia yang sangat ingin agar bahasa pergerakan menggunakan bahasa Melayu, kemudian menyadari bahwa bahasa ini belum banyak dikuasai oleh orang Jawa. Satu-satunya bahasa yang dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan petani dan kaum buruh ialah bahasa Jawa *Ngoko*. Aspek kesamaan bahasa ini penting bagi kaum pergerakan karena dapat menyampaikan pesan perjuangan. Selain itu, bagi kaum Kromo, gerakan DD merupakan cara bagi bumiputra untuk setara dengan bangsa asing yang menindas mereka.

### ***Kemunduran Djawa Dipa***

Di balik misinya yang mengusung nilai demokratisasi di tanah Jawa dan memperjuangkan kaum tertindas, DD akhirnya mengalami kemunduran. Ada beberapa sebab yang diduga menjadi faktor pendorong. Pertama, pemerintah Hindia Belanda yang mengalami tantangan besar dari gerakan buruh di tanah Jawa, mendorong agar organisasi ini, terutama, untuk berfokus pada isu budaya, bukan politik. Hal ini kemudian yang menyebabkan koran Hindia Dipa tidak dapat bertahan lebih dari dua tahun karena kekurangan dana. Perlu diketahui pula bahwa koran ini terbit dalam dua bahasa: Melayu dan Jawa *Ngoko* dengan aksara Jawa, dengan harapan agar pesannya tersampaikan ke seluruh rakyat Hindia. Kemunduran DD juga muncul di tengah organisasinya.

Faktor kedua ialah terjadi perpecahan DD Surabaya dan Semarang ketika Partai Komunis Indonesia (1820) berdiri dan banyak anggotanya dari Sarikat Islam Semarang. Perlu dicatat pula bahwa DD ini memiliki pimpinan yang berafiliasi dengan Sarikat Islam. Selain itu, ada penolakan konsep “sama rata sama rasa” karena setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Dalam bidang pendidikan, bahasa *Ngoko* yang semula diusulkan menjadi bahasa pengantar mengalami dilema. Hal ini karena ada keyakinan bahwa bahasa mencerminkan mentalitas sehingga ada yang percaya bahwa bila pendidikan diantar dengan bahasa Belanda maka para pemelajar akan berfikir seperti orang Belanda. Sebagai jalan tengahnya kemudian DD menganjurkan penggunaan bahasa Jawa *Kromo* yang diterjemahkan ke dalam bahasa *Ngoko*.

### ***Membaca Buku Djawa Dipa***

Buku ini memberikan kita pemahaman tentang aspek politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh terhadap pilihan/perilaku bahasa. Bahasa Jawa *Ngoko* yang digunakan secara luas

oleh orang Jawa kelas pekerja, diakui atau tidak, telah menjadi alat emansipasi di tengah masyarakat Jawa yang memiliki tradisi kebahasaan yang rumit. Buku ini juga memberikan kita pemahaman tentang perjuangan kelas buruh di masa kolonial Hindia Belanda. Sebagai buku yang diinspirasi oleh skripsi, Thamrin memberikan pencerahan tentang gejala sosial yang pernah terjadi di tengah masyarakat Jawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia. Selain itu, proses-proses yang terjadi pada DD merupakan cikal bakal kesadaran yang lebih luas di Hindia Belanda karena mereka juga akhirnya menyadari bahwa hanya bahasa Melayu yang dapat menjalin persatuan di tanah jajahan Hindia Belanda.

Sebagai naskah yang membahas dari sudut pandang sejarah, buku ini menawarkan informasi yang komprehensif tentang bagaimana memahami perkembangan bahasa di tengah masyarakat. Namun demikian, aspek kebahasaan yang menjadi sasaran pokok perjuang DD ini kurang dibahas lebih mendalam. Beberapa kosakata yang disebutkan di dalam teks dirasa masih kurang memadai untuk memahami penolakan dan inovasi baru dari sisi kebahasaan.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, B. R. O'G. (1983). *Imagined communities: Reflection on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.
- Thamrin, M. H. (2022). *Djawa Dipa: Sama rata, sama rasa, sama bahasa 1917—1922*. Jakarta: Komunitas Bambu.